

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *SHARIAH COMPLIANCE* PADA  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017**



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**DESI NOVIANA EKA PUTRI  
NPM : 1451020181**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *SHARIAH COMPLIANCE* PADA  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Oleh:  
DESI NOVIANA EKA PUTRI  
NPM. 1451020181**

**Jurusan : Perbankan Syari'ah**

**Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.**

**Pembimbing II : Sinta Ayu Purnamasari, S.E.I., M.S.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/2019 M**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PENGUNGKAPAN *SHARIAH COMPLIANCE* PADA  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK  
UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017**

Oleh  
Desi Noviana Eka Putri

Bank Umum Syariah di Indonesia pada dasarnya wajib untuk mengungkapkan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* bank, yaitu pada laporan GCG dan *annual report* dari masing-masing bank umum syariah. *Shariah Compliance* wajib diungkapkan selain dikarenakan suatu kewajiban dari peraturan yang berlaku, tetapi juga sebagai wujud dari syariahnya suatu bank tersebut. *Shariah compliance* dapat diukur berdasarkan tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur pengungkapannya, yaitu akad yang digunakan, pengelolaan dana zakat, keberadaan dewan pengawas syariah, laporan keuangan, bisnis yang dibiayai, lingkungan kerja, serta sumber dana bank umum syariah.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perihal pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif normatif, dengan melakukan pengamatan pada sepuluh dari tiga belas bank umum syariah di Indonesia terkait pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* masing-masing bank. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari kesepuluh BUS yang diteliti. Pengamatan dilakukan dengan meneliti Laporan Keuangan dan laporan pelaksanaan GCG BUS tahun 2017.

Dari hasil penelitian, berdasarkan lima indikator pengungkapan yaitu akad yang digunakan, pengelolaan dana zakat, keberadaan dewan pengawas syariah, laporan keuangan, bisnis yang dibiayai, dapat di tarik kesimpulan bahwa, kesepuluh bank umum syariah telah mengungkapkan *shariah compliance* dengan tingkat pengungkapan di atas 50% dengan indikator yang telah yang diungkapkan secara keseluruhan yaitu bisnis yang biayai tidak bertentangan dengan syariah, sedangkan indikator dengan pengungkapan terendah yaitu keberadaan DPS. Pengungkapan *shariah compliance* tertinggi yaitu oleh Bank BRI Syariah sebesar 94%, sedangkan pengungkapan terendah yaitu Bank Victoria Syariah sebesar 65%.

**Kata Kunci:** *Shariah Compliance, Good Corporate Governance, Bank Umum Syariah.*





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jalan Let Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan Shariah Compliance pada Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017**

**Nama Mahasiswa : Desi Noviana Eka Putri**

**NPM : 1451020181**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Any Eliza, S.E., M.Ak.**

**Sinta Ayu Purnamasari, S.E.I., M.E.I.**

**NIP. 198308152006042004**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**

**NIP. 197905142003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jalan Let Kol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGUNGKAPAN SHARIAH COMPLIANCE PADA PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017”**, Disusun oleh **Desi Noviana Eka Putri, NPM. 1451020181**, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 22 Februari 2019.**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.**

**Sekretaris : Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak.**

**Penguji I : Drs. H. Nasruddin, M.Ag.**

**Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak.**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.**

**NIP. 195808241989031003**

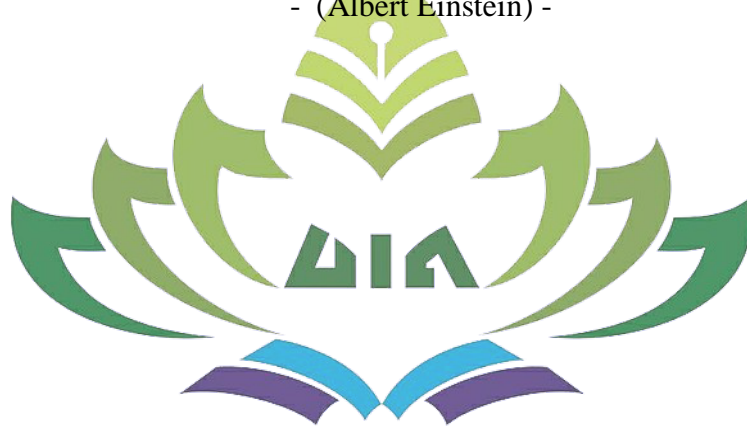


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
أَعْمَالَكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada  
Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amalmu”*  
- {Q.S. Muhammad (47); 33}<sup>1</sup> -

*“Science without religion is lame, religion without science is blind”*  
- (Albert Einstein) -



---

<sup>1</sup> Q.S Muhammad ayat 33, ‘Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya’ (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media), Juz ke-47, h.510

## PERSEMBAHAN

Dipersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Dedi Teguh Prasetyo, S.E., dan ibunda Sri Andriani, S.E., yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengasihi dan menyayangi, dan mencintaiku setulus hati, serta segala pengorbanannya, karena atas jerih payah kalianlah yang mampu menghantarkan aku hingga bisa berada di jenjang tinggi seperti sekarang ini. Sungguh tiada kata lagi yang bisa ku ucapkan kepada ayah dan mama selain terimakasih yang sebesar-besarnya atas didikan dan kepercayaan mama dan ayah kepadaku.
2. Adikku satu-satunya yang sangat kusayangi Diego Prasetyo Putra, terimakasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan, dan dukungan yang selama ini diberikan, semoga kita semua bisa membuat orang tua kita tersenyum bahagia, serta seluruh keluarga besarku yang lain yang mohon maaf tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua baik moril maupun financial sehingga aku bisa menjalani perkuliahan ini dengan lancar tanpa merasa kekurangan hal lain.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung '14 yang tercinta.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Desi Noviana Eka Putri
2. TTL : Bandar Lampung, 08 November 1996
3. Alamat : Perumahan Griya Abdi Negara (BW Bawah) Blok  
B.8 No.5 RT.11 Lk.03, Sukabumi, Bandar  
Lampung
4. No.HP : 08975448658
5. E-mail : [desiputri0811@gmail.com](mailto:desiputri0811@gmail.com)
6. Nama Ayah : Dedi Teguh Prasetyo, S.E.
7. Nama Ibu : Sri Andriani, S.E.
8. Nama Adik : Diego Prasetyo Putra

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Fransiskus 1 Tanjung Karang, selesai pada tahun 2002.
2. SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, selesai pada tahun 2008.
3. SMP Negeri 24 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2011.
4. SMA Negeri 6-Model Bandar Lampung, selesai pada tahun 2014.
5. Untuk selanjutnya, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Pengungkapan Shariah Compliance pada Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017**” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalmnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ahmad Habibi, S.E., M.E., dan Kurniawan ,M.E.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Any Eliza, M.Ak., dan Sinta Ayu Purnamasari, S.E.I., M.E.I., selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Istitut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
5. Teman-teman dari Perbankan Syariah – E '14, terimakasih telah memberikan dukungan, kasih sayang dan canda tawa yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Bandar Lampung,      Februari 2019

Penulis,

Desi Noviana Eka Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Agency Theory</i> .....	17
B. Bank Syariah	
1. Definisi Bank Syariah .....	18
2. Karakteristik Bank Syariah .....	19
3. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia .....	21
C. <i>Shariah Compliance</i>	
1. Definisi <i>Shariah Compliance</i> .....	22
2. Tujuan <i>Shariah Compliance</i> .....	26
3. Regulasi Hukum <i>Shariah Compliance</i> di Indonesia .....	27
4. Indikator Ketentuan <i>Shariah Compliance</i> .....	30
5. Mekanisme Pengawasan <i>Shariah Compliance</i> Bank Umum Syariah .....	32
6. Metode Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> pada GCG Bank Umum Syariah .....	33
D. <i>Good Corporate Governance</i>	
1. Definisi <i>Corporate Governance</i> .....	34
2. <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Syariah .....	36
3. Teori-Teori <i>Good Corporate Governance</i> .....	40
4. Model-Model <i>Good Corporate Governance</i> .....	43
5. Urgensi <i>Good Corporate Governanace</i> pada Bank Syariah.....	45

E. Tinjauan Pustaka .....	47
F. Kerangka Berfikir.....	52

### **BAB III. LAPORAN PENELITIAN**

A. Profil Singkat Bank Umum Syariah di Indonesia.....	55
B. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017 .....	64

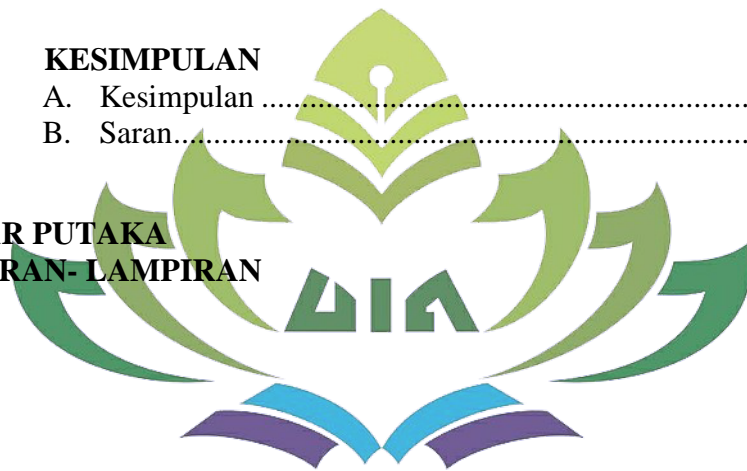
### **BAB IV. HASIL DAN ANALISA DATA**

A. Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> pada Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Umum Syariah di Indonesia .....	76
B. Analisis Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> pada pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Umum Syariah Tahun 2017.....	91

### **BAB V. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

### **DAFTAR PUTAKA LAMPIRAN- LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Definisi Operasional Variabel.....	14
Tabel.2 Regulasi Sistem <i>Shariah Compliance</i> di Indonesia .....	28
Tabel.3 Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> pada GCG BUS.....	34
Tabel.4 Tinjauan Pustaka .....	49
Tabel.5 Pengungkapan Sub-indikator Akad yang Digunakan BUS .....	78
Tabel.6 Pengungkapan Sub-indikator Pengelolaan Zakat .....	82
Tabel.7 Pengungkapan Sub-indikator Keberadaaan DPS BUS .....	83
Tabel.8 Pengungkapan Sub-Indikator Neraca.....	85
Tabel.9 Pengungkapan Sub-Indikator Laporan Laba Rugi .....	86
Tabel.10 Pengungkapan Sub-indikator Laporan Perubahan Ekuitas .....	87
Tabel.11 Pengungkapan Sub-Indikator Laporan Sumber Dana Kebajikan .....	88
Tabel.12 Pengungkapan Sub-Indikator Bisnis Usaha yang Dibiayai Tidak Bertentangan dengan Syariah.....	89
Tabel.13 Data Hasil <i>Scoring</i> .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Kerangka Berpikir .....	53
----------------------------------	----





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Olah Data Penelitian Metode *Scoring*
- Lampiran 2 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 3 Berita Acara Munaqasyah
- Lampiran 4 Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 5 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 Surat Penunjukkan Penguji Munaqasyah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap judul proposal ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul “Analisis Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017”, sebagai berikut :

1. Analisis, merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab- musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Pengungkapan, merupakan proses, cara, perbuatan mengungkapkan atas beberapa kata yang mempunyai makna yang sama dengan sebuah kata tertentu.<sup>2</sup>
3. *Shariah Compliance*, merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>
4. *Good Corporate Governance* (GCG), merupakan pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia - Analisis*” (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2007), h.43

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia - Pengungkapan*” ,*Op.Cit.*, h. 1247

<sup>3</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h.64

5. Bank Umum Syariah, merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2017. Penelitian ini dibuat berdasarkan laporan *Good Corporate Governance* dan *Annual Report* dari 10 bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi dengan jumlah bank umum syariah yang diteliti, yaitu berjumlah sepuluh (10) dari total tiga belas (13) bank umum syariah di Indonesia. Alasan tidak meneliti keseluruhan bank umum syariah yang ada dikarenakan belum tersedianya data yang penulis butuhkan dan sulitnya mengakses data yang diperlukan dalam penelitian.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi tentang “Analisis Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017” adalah;

### **1. Secara Objektif**

Bank Syariah merupakan lembaga yang dianggap “sakral” dikarenakan menggunakan label syariah dalam perusahaannya. Salah satu hal yang harus diterapkan bank syariah yaitu *shariah compliance*

---

<sup>4</sup>Marfin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 200

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Bab I – Ketentuan Umum*, Pasal 1 Ayat 8, h.3



atau kepatuhan pada syariah, dan kemudian mengungkapkannya dalam laporan keuangan dan laporan GCG dari masing- masing bank, yang bertujuan sebagai jati diri dari bank umum syariah sehingga dapat menciptakan persepsi positif bagi para pembaca laporan bank umum syariah.

## 2. Secara Subjektif

- a. Bahwa data dan *literature* yang mendukung pembahasan proposal ini cukup tersedia, baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu.
- b. Masalah yang dibahas dan dikaji ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, yaitu jurusan perbankan syariah.

## C. Latar Belakang

Perbankan syariah secara esensial berbeda dengan perbankan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian internal dari sistem syariah yang mana bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.<sup>6</sup>

Salah satu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dari segi mekanisme sistemnya yaitu dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) didefinisikan

---

<sup>6</sup> Kasmir, “*Manajemen Perbankan*” ( Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010), h. 10

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*).<sup>7</sup>

Perbedaan antara GCG konvensional dengan syariah terletak pada *shariah compliance*-nya, yaitu kepatuhan pada syariah (*shariah compliance*).<sup>8</sup> Sedangkan ke lima prinsip dasar GCG yang lain bank syariah sama dengan bank konvensional, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran.

*Shariah compliance* merupakan *key player* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pentingnya pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap

---

<sup>7</sup> Forum for Corporate Governance (FCGI), “*Corporate Governance*” (Jakarta), FCGI Jilid I, Edisi 3, h.3

<sup>8</sup> Muhammad, “*Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh dan Keuangan*” (Yogyakarta: YKPN, 2014) h. 649

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.<sup>9</sup>

Adrian Sutedi menyebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain, (1) Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (2) Dana zakat dihitung dan dibayar dikelola dengan aturan prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku, (4) lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, (5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) terapat DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional, dan (7) sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.<sup>10</sup>

Indikator-indikator *shariah compliance* yang wajib dilaporkan dalam laporan bank syariah seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak semua bank syariah melaporkannya secara lengkap berdasarkan indikator-indikator tersebut. Beberapa bank hanya mengungkapkan beberapa informasi yang dianggap penting untuk di ungkapkan kepada *stakeholders*. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG bank syariah di Indonesia.

Pengungkapan *shariah compliance* pada laporan GCG bank syariah wajib

---

<sup>9</sup> Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.2, No.2, Tahun 2014, h.107

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, "Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.146



dilakukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat bahwa terdapat perbedaan pada GCG bank konvensional dan bank syariah.

Prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *Coporate Governance* atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dan yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Seperti yang dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  
 نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 191-192

<sup>12</sup> Q.S An-Nisa ayat 59, ‘*Waqaf Qur'an*’ (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang), Juz ke-5, h.87

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin'Adi, ketika dia diutus Rasulullah SAW.dalam sebuah perang. Ayat ini bertujuan agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah dan perintah-perintah Rasul Muhammad, serta ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan selama ketetapan tersebut tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul. Kemudian, jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah yang tidak dapat ditemukan solusinya, maka kembalilah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir.<sup>13</sup>

Kesimpulan makna yang dimaksud dari ayat tersebut ialah hendaknya ada segolongan orang dari kalangan umat muslim ini yang bertugas untuk selalu hidup sesuai dengan ketaatan syariah baik secara individu, kelompok, maupun perusahaan.

Berdasarkan pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian nasabah memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah aktif antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan

---

<sup>13</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "*Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), Jilid 1, h.240-241

prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah dengan prinsip syariah sering dipertanyakan oleh nasabah. Hal ini menjadi salah satu alasan penyebab reputasi bank syariah di mata masyarakat tidak terlalu baik, sehingga akan berdampak pada loyalitas nasabah maupun masyarakat dalam menggunakan jasa ataupun produk dari bank syariah itu sendiri.<sup>14</sup>

Teori yang mendukung *Coporate Governance* dikenal dengan *Agency Theory*. Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion* making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Dalam penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen.<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Bab V Pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah, dijelaskan bahwa setiap bank syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, di mana tugas DPS itu sendiri sebagai

---

<sup>14</sup> Siti Maria Wardayati, *Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Jurnal Walisongo, Vol. 19, No.1, Mei 2011, h. 5

<sup>15</sup> Eko Raharjo, *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vo.2 No.1, 2007, h.37



penasehat sekaligus pengawas dari keberlangsungan operasional bank syariah agar sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah. Namun, yang menjadi permasalahan di sini ialah DPS hanya melakukan pengawasan hanya di kantor pusat saja, sedangkan untuk di kantor cabang pengawasan syariah hanya di pantau secara garis besarnya saja oleh para *reviewers* yang merupakan karyawan independen di suatu cabang bank yang kemudian akan dilaporkan kepada pihak DPS. Dengan tidak turun langsungnya DPS ke kantor-kantor cabang maka pengawasan syariah akan di rasa kurang maksimal.

Lebih lanjut, penerapan *shariah compliance* sebagai pelengkap dari pelaksanaan GCG bank syariah wajib diungkapkan pinak bank secara rutin, baik di dalam laporan tahunan bank maupun laporan GCG bank, serta diharapkan bagi anggota DPS agar dapat mengawasi dan memberikan saran kepada bank syariah terkait dengan masalah *shariah compliance* bank syariah perihal pelaksanaan dan pengungkapannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang **“Analisis Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017”**.

#### D. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017?

#### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya ekonomi dan bisnis Islam mengenai pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG BUS di Indonesia.

###### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan, diharapkan agar pihak bank dapat mempertimbangkan hasil penelitian penulis, dan memperbaiki kekurangan pada laporan GCG dan *annual report* dari masing-masing BUS.

- 2) Bagi penulis, diharapkan setelah meneliti, penulis menjadi paham terkait judul dan permasalahan ini, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.
- 3) Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengungkapan *Shariah Compliance* pada pelaksanaan GCG BUS di Indonesia, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian dengan permasalahan yang sama dengan penulis.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>16</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data dalam penyelesaian proposal adalah :

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat kualitatif dan bersifat deskriptif analisis normatif, karena metode penelitian ini berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan dibandingkan dengan

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, “*Metodelogi penelitian*” (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h .112.



laporan tiap-tiap bank umum syariah yang tersedia. Adapun data tersebut diperoleh dari laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan *annual report* dari 10 bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017 serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait dengan judul penelitian. Yang difokuskan pada pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017.

## 2. Sumber Data

Dalam rangka menjawab persoalan yang dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, karena merupakan aspek yang penting dalam penelitian. Pada penelitian ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian yakni data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>18</sup> Data sekunder juga dapat diperoleh melalui berbagai media informasi, seperti buku, laporan keuangan, pamphlet, brosur, majalah dan sebagainya.

Dengan sumber data sekunder tersebut diharapkan memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang diharapkan peneliti dan dapat menemukan jawaban atas permasalahan.

---

<sup>17</sup> Sugyiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2008), h.402

<sup>18</sup> Sugyiono, "Metode Penelitian Bisnis" (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 402.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus.<sup>19</sup> Jumlah populasi terkait dengan penelitian ini ialah tiga belas (13) bank umum syariah di Indonesia.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sample. Dinamakan penelitian sample apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sample. Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>20</sup>

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel ialah *Puposive Sample*, yaitu teknik yang mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Penelitian ini dibatasi dengan jumlah bank umum syariah yang diteliti, yaitu berjumlah sepuluh (10) dari total tiga belas (13) bank

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.173

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.174

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.183

umum syariah di Indonesia yakni; Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Victoria Syariah.. Alasan tidak meneliti keseluruhan bank umum syariah yang ada dikarenakan belum tersedianya data yang penulis butuhkan dan sulitnya mengakses data yang diperlukan dalam penelitian.

#### 4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Ahmadi dan Narbuko, definisi operasional variabel merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan, yang dapat diamati (diobservasi), sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.<sup>22</sup>

Tabel.1  
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
<i>Shariah Compliance</i> pada Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (Adrian Sutedi)	1. Akad produk penghimpunan dan penyaluran sesuai prinsip syariah
	2. Pengitungan dan pembayaran dalam pengelolaan dana zakat
	3. Seluruh aktivitas transaksi ekonomi dilaporkan sesuai standar syariah yang berlaku
	4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
	5. Bisnis usaha penerima danan tidak bertentangan dengan syariah
	6. Terdapat DPS
	7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

<sup>22</sup>Abu Ahmadi dan Chaolid Narbuko, “*Metodelogi Penelitian*” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.61

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan beberapa metode dokumentasi, yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan Laporan GCG, *annual report* bank umum syariah paatahun 2017, serta peraturan regulasi yang terait dengan penelitian.

## 6. Pengelolaan dan Analisis Data

### a. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan, maka informasi dan hasil penelitian tersebut diolah dengan menggunakan teknik-teknik pengklasifikasikan. Kemudian dibuat paragraf-paragraf;

- 1) *Editing*, yaitu mengadakan pengecekan terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah ditetapkan atau perlu dilengkapi lebih lanjut.
- 2) *Tabulating*, yaitu memasukkan data-data yang telah diklasifikasi untuk mempermudah dalam mengambil keputusan.
- 3) *Systemizing*, yaitu mengeluarkan hasil penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menetapkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

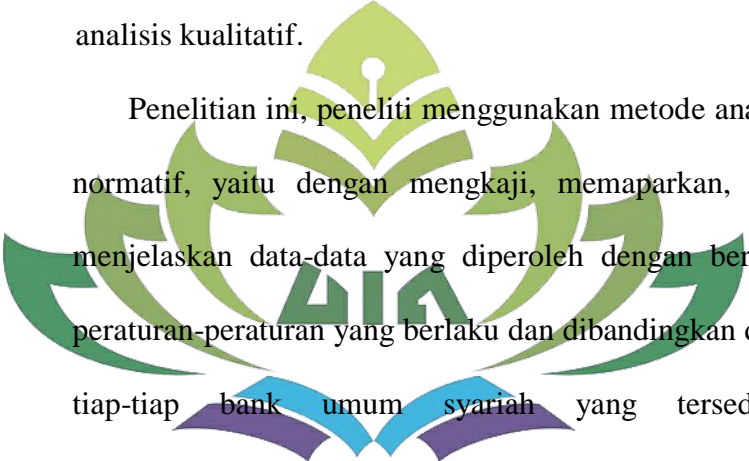
---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 274.



b. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.<sup>24</sup> Analisis data terkait secara sistematis terhadap apa yang dilihat, dengar, dan baca sehingga dapat membuat kita mengerti. Setelah data terkumpul, data diolah sedemikian rupa kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.



Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan dibandingkan dengan laporan tiap-tiap bank umum syariah yang tersedia mengenai pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* bank umum syariah di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Neong Muhadjir, “Metode Penelitian Kualitatif; Edisi 4” (Rake Sarasin, 2011)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling teori keagenan (*agency theory*) yaitu teori terkait dengan adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola usaha (agen), hubungan keagenan (antara *agent* dengan *principal*) di mana tidak ada jaminan bahwa agen akan mengambil keputusan yang menjamin kepentingan pemilik, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari: 1) biaya pengawasan oleh pemilik, 2) biaya pengikatan agen, dan 3) sisa kerugian yang harus ditanggung pemilik—misal akibat kesalahan pengambilan keputusan oleh agen.<sup>1</sup>

Adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola pada perusahaan memunculkan istilah *stakeholder*. Pada awalnya, satu-satunya *stakeholder* pada perusahaan adalah pemegang saham atau pemilik yang harus menanggung biaya keagenan yang muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Hal ini didasarkan pada pandangan Friedman pada tahun 1962 yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Freeman pada tahun 1983 dan

---


<sup>1</sup> Michael C. Jensen dan William H. Meckling, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, 1976, h. 5.

memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, kepentingan tertentu dan pembuat regulasi.<sup>2</sup>

Teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan, dimana manajer ini mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing.<sup>3</sup>

## B. Bank Syariah

### 1. Definisi Bank Syariah



Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bung. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7

---

<sup>2</sup> Imam Ghazali dan Anis Chariri, "*Teori Akuntansi*" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 409.

<sup>3</sup> Michael C. Jensen dan William H. Meckling, *Op.Cit.*,

<sup>4</sup> Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.2

disebutkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja, terapat dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah: 1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; 2) bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sementara, bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Di mana dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>5</sup>

## 2. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah, ialah bank yang berasaskan antara lain, asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain;

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

---

<sup>5</sup> Karnaen Perwataatmadja dan M.Syafei Antonio, “ *Apa dan Bagaimana Bank Islam*” (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997), hlm. 1

- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- c. Konsep uang adlah sebagi alat tukar, bukan sebagi komoditas;
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.<sup>6</sup>

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Karena berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini;

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
- b. Bukan riba;

---

<sup>6</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*” (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), hlm.1-2

<sup>7</sup> Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5



- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- d. Tidak ada penipuan ( *gharar* );
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan
- f. Tidak mengandung unsur judi.<sup>8</sup>

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

### 3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat

---

<sup>8</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 6

pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>9</sup>

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

### ***C. Shariah Compliance***

#### **1. Definisi *Shariah Compliance***

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip shari'ah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>10</sup>

*Shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.<sup>11</sup>

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>12</sup> Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa

<sup>10</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 - Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, h.1

<sup>11</sup> Rahman El Junusi, *Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1 Mei 2012, h.99

<sup>12</sup> Zainal Arifin, *"Dasar-dasar Manajemen Bank syariah"* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h.2

*shariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *shariah compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.<sup>13</sup> Kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>15</sup>

Adapun *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara

---

<sup>13</sup> Ansori, *Pengungkapan Shariah compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), h.3

<sup>14</sup> Bank Indonesia, *Loc.Cit.*.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, "*Perbankan Syariah - Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145

Islam.<sup>16</sup> Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.<sup>17</sup> Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafei Antonio, “*Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*” (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h.64

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*,



dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.<sup>18</sup>

Dengan demikian, *shariah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.<sup>19</sup> Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuanketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

## 2. Tujuan *Shariah Compliance*

Bank Umum Shari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan shari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip shari'ah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai shari'ah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan shari'ah.<sup>20</sup> Dalam Al-Qur'an Allah SWT.berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*, Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, h. 3

<sup>20</sup> Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*shari'ah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan shari'ah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al- quran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap shari'ah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.

Artinya:

"Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia kecuali untuk menyembah ('ibadah) Ku." (Q.S. Az-Zariyat: 56)<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintah Nabi Muhammad SAW beristikamah dalam mengajak umatnya mengesakan Allah, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Nyu sendiri, melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada Allah, karena ibadah bermanfaat bagi manusia.<sup>22</sup>

Untuk mengklarifikasi risiko syariah yang dihadapi bank Islam. Risiko syariah dan risiko operasional merupakan *credible hazard* bagi bank dan *stakeholder*. Konsekuensi yang mungkin dari ketidakpatuhan syariah meliputi biaya yang tinggi, kerugian finansial, masalah likuiditas, operasional bank, kegagalan bank, penodaan industri, dan ketidakstabilan finansial. Studi tersebut mendefinisikan risiko syariah, identifikasi kredit, hukum, kepatuhan, pasar, dan risiko reputasi, serta kategorisasi akibat dan peristiwanya.<sup>23</sup>

### 3. Regulasi Sistem *Shariah Compliance* di Indonesia

Regulasi sistem *shariah compliance* dibuat oleh badan pembuat regulasi atau bank sentral di masing-masing negara untuk

<sup>21</sup> Q.S Az-Zariyat ayat 56, "*Waqaf Qur'an*" (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang), h. 523 Juz ke-27

<sup>22</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "*Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), Jilid 2, h. 679

<sup>23</sup> Amalia Nur Latifa, *Op.Cit.*, h.13

memfasilitasi praktik *good corporate governance* LKS dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel.2  
Regulasi Sistem *Shariah Compliance* di Indonesia

Regulasi	Uraian
1. UU No21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: a. Dewan Pengawas Syariah, BAB V Pasal 32, b. Tata kelola bank syariah BAB VI Pasal 34	a. Kewajiban bank syariah membentuk DPS melalui RUPS atas persetujuan MUI b. Fungsi DPS untuk memberikan nasehat dan saran bagi direksi dan pengawas bank terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah c. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI d. Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip-prinsip GCG e. Bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Penjelasan pada pasal 6)	Hasil amandemen UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan pada bagian penjelasan pasal disebutkan tentang DPS meskipun tidak diuraikan lebih lanjut lagi.
3. PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Pasal 34,35,36,37,38,39)	a. Bank berkewajiban membentuk DPS di tingkat pusat b. Syarat-syarat menjadi anggota DPS dilihat dari segi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan c. Tugas dan tanggung jawab DPS d. Komposisi DPS dan batasan rangkap jabatan sebagai DPS pada bank lain e. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS
4. PBI No.11/3/PBI/2009 tentang	a. Usulan pengangkatan DPS

<p>Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 44,45,46,47,48,49,50,51)</p>	<p>dan masa jabatan; b. Tugas dan tanggungjawab DPS; c. Pembuatan laporan hasil pengawasan oleh DPS; d. Ketentuan rapat bagi DPS; e. Aspek transparansi DPS.</p>
<p>5. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 21,26,27,32,33)</p>	<p>a. Persyaratan anggota DPS; b. Komposisi DPS, ketentuan rangkap jabatan di DSN dan Bank Syariah c. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab DPS; d. Mekanisme pengangkatan DPS.</p>
<p>6. SEBI No.12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>	<p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris; b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi; c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; d. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS; e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; f. Penanganan benturan kepentingan; g. Penerapan fungsi kepatuhan; h. Penerapan fungsi audit intern; i. Penerapan fungsi audit ekstern j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal.</p>
<p>7. SEBI No.8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Bagi Hasil Pengawas Syariah</p>	<p>Ketentuan isi laporan hasil pengawasan DPS pada bank syariah.</p>
<p>8. Surat Keputusan DSN-MUI No.03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan</p>	<p>a. Ketentuan keanggotaan DPS; b. Syarat-syarat keanggotaan DPS; c. Tugas dan fungsi DPS;</p>

Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah	d. Prosedur pengangkatan DPS; e. Kewajiban anggota DPS terkait hubungannya dengan DSN-MUI; f. Ketentuan perangkapan keanggotaan DPS di lembaga keuangan syariah yang lain.
---	--

Sumber; Diolah,2018

#### 4. Indikator Ketentuan *Shariah Compliance*

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Menurut buku Adrian Sutedi yang berjudul *Perbankan Syariah* (tinjauan dari berbagai segi hukum) menyebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah (*shariah compliance*) pada pelaksanaan GCG di dalam lembaga keuangan syariah, yaitu;

Tabel.3  
Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan *Shariah Compliance* pada GCG BUS

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah	<b>Pengumpulan Dana;</b> a. Giro (Akad <i>Wadiah</i> ) b. Tabungan 1). Akad <i>wadi'ah</i> atau akad lain 2). Akad <i>Mudharabah</i> atau akad lain c. Deposito (Akad <i>Mudharabah</i> ) <b>Penyaluran Dana;</b> a. Jual Beli (Akad <i>Murabahah</i> ) b. Pembiayaan Bagi Hasil 1) <i>Mudharabah</i> 2) <i>Musyarakah</i> c. Pembiayaan Lain 1) Sewa Beli ( Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamblik</i> ) 2) Pinjaman dalam bentuk piutang



		( Akad <i>Qardh</i> ) 3) Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i> )
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat</li> <li>b. Periode laporan sumber dan penggunaan dana zakat</li> <li>c. Sumber dana zakat</li> <li>d. Penyaluran dan penggunaan dana zakat</li> <li>e. Kenaikan dan penurunan dana zakat</li> <li>f. Saldo awal dan akhir dana zakat</li> </ul>
3.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Anggota DPS</li> <li>b. CV DPS</li> <li>c. Foto DPS</li> <li>d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI</li> <li>e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi</li> <li>f. Masa jabatan DPS</li> <li>g. Tugas dan tanggungjawab DPS</li> <li>h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan</li> <li>i. Waktu penyampaian laporan</li> <li>j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab</li> <li>k. Jumlah rapat</li> <li>l. Risalah rapat</li> <li>m. Pengungkapan rangkap jabatan</li> <li>n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi</li> <li>o. Pengungkapan nilai remunerasi</li> <li>p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan</li> <li>q. Opini DPS yang di <i>publish</i></li> </ul>
4.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Neraca</li> <li>b. Laporan Laba Rugi</li> <li>c. Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>d. Laporan Penggunaan Dana Kebajikan</li> </ul>
5.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengandung <i>riba</i></li> <li>b. Tidak mengandung <i>maysir</i></li> <li>c. Tidak mengandung <i>gharar</i></li> <li>d. Tidak mengandung <i>haram</i></li> <li>e. Tidak mengandung <i>dzalim</i></li> </ul>
6.	Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah	Sub-indikator tidak dapat diteliti berdasarkan <i>annual report</i> dan laporan GCG.

7.	Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal	Sub-indikator tidak dapat diteliti berdasarkan <i>annual report</i> dan laporan GCG.
----	---	--

Sumber: Adrian Sutedi, 2009

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk tabungan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.<sup>24</sup>

## 5. Mekanisme Pengawasan *Shariah Compliance* Bank Umum Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan shari'ah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan *transendental*. Pertama, konsep *shari'ah review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan shari'ah. Kedua, konsep internal sharia review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip shari'ah yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

Penjelasan pengawasan internal shari'ah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal shari'ah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, "*Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*" (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.146

<sup>25</sup> Fahrur Ulum, "*Perbankan Syariah di Indonesia*" (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), h.213

untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan shari'ah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal shari'ah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui sharia review, dan internal audit melalui internal *shariah review*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip shari'ah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan shari'ah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit shari'ah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.<sup>26</sup>

## **6. Metode Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah**

Metode yang digunakan dalam mengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG BUS di Indonesia penulis menggunakan metode *scoring*. Metode *Scoring* atau *Weighted Linear Combination* (WLC) digunakan untuk merepresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak tertentu pada suatu

---

<sup>26</sup> Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "*Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng*" (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012). h.145

fenomena secara spesial.<sup>27</sup> Indeks pengungkapan *shariah compliance* dihitung berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Muhammad Ali dibawah ini;

$$NP (\%) = \frac{n1}{N0} \times 100\%$$

Keterangan;

1. NP = indeks pengungkapan *sharia compliance* oleh bank syariah melalui laporan tahunannya;
2. n = banyaknya item *sharia compliance* yang telah diungkapkan oleh BUS;
3. N = banyaknya item yang seharusnya diungkapkan oleh BUS.<sup>28</sup>

*Scoring* dilakukan untuk mencari poin pengungkapan yang dinilai dengan 1 jika diungkapkan dan 0 atau kosong jika tidak diungkapkan dari item pengungkapan yang telah dijabarkan dalam tabel indikator penelitian. Kemudian dari hasil uji *checklist* tersebut dilakukan perhitungan indeks.<sup>29</sup> Setiap parameter masukan akan diberikan skor dan kemudian akan dijumlahkan untuk memperoleh tingkat keterkaitan.<sup>30</sup>

## D. Good Corporate Governance

### 1. Definisi Good Corporate Governance

Menurut pendapat Farrar, secara etimologis kata *governance* berasal dari bahasa Prancis kuno *gouvernance* yang berarti

<sup>27</sup> S.Drobne dan A. Lisec, "Multi-attribute Decision Analysis in GIS: Weighted Linear Combination and Ordered Weighted Averaging" (Informatica, 2009),h.459-474

<sup>28</sup> Muhammad Ali, "Penelitian Pendidikan" (Bandung: Angkasa Bandung, 1987) , h.184

<sup>29</sup> Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, *Analisis Pengungkapan Syariah Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.2, No.2, Tahun 2014, h.116

<sup>30</sup> Dony M. Sihotang, *Metode Scoring dan Metode Fuzzy*, Jurnal JNTETI, Vo.5, No.4, November 2016, h.303

pengendalian (*control*) dan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).<sup>31</sup>

Menurut Claessens, definisi dari *corporate governance* terbagi menjadi dua kategori. Definisi pertama terkait dengan seperangkat pola perilaku, yaitu perilaku aktual perusahaan, dalam hal ini termasuk pengukuran kinerja, efisiensi, pertumbuhan, struktur finansial, dan perilaku terhadap pemegang saham serta *stakeholder* lain. Adapun definisi yang kedua yaitu terkait dengan kerangka normatif, yaitu aturan (*rules*) di mana perusahaan beroperasi di bawah aturan tersebut, dengan aturan yang bersumber dari sistem perundang-undangan, sistem hukum, pasar keuangan, dan pasar faktor produksi (tenaga kerja). Definisi kategori pertama digunakan untuk studi yang dilakukan pada satu negara atau perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Adapun definisi kategori kedua bisa digunakan untuk penelitian komparatif yang membandingkan kerangka normatifnya.<sup>32</sup>

*Corporate governance* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai “penguasaan perusahaan” dan didefinisikan sebagai pokok persoalan mengenai siapa yang berkuasa atau mengawasi perusahaan join saham (*joint-stock company*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Akhmad Syakhroza, “*Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*” (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), h. 4

<sup>32</sup> Stijn Claessens, *Corporate Governance and Development*, Global Corporate Governance Forum, Focus I, 2003, hlm. 4.

<sup>33</sup> C. Pass, B. Lowes, dan L. Davies, “*Kamus Lengkap Ekonomi*”, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Edisi 2 (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 117.



Berbagai literatur mendefinisikan istilah *corporate governance* dengan pengertian yang berbeda-beda maupun sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut tinjauan Syakhroza, keberagaman definisi *corporate governance* biasanya disesuaikan dengan konteks bahasan, asumsi serta perspektif (*school of thoughts*) yang digunakan. Namun demikian, dilihat dari substansi pokok dari definisi-definisi *corporate governance* tetap mengandung esensi yang sama dengan esensi yang ada pada ranah kebijakan publik, yaitu pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan.<sup>34</sup>

## 2. *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah

Perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). *Shiddiq* berartimemastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi caracara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). *Tabligh* berarti secara berkesinambungan melakukan

---

<sup>34</sup> Mal An Abdullah, “*Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 28.

sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh daripemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan *Fathanah* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).<sup>35</sup>

Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut Surat Edaran BI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2011 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh sebuah bank dibagi dalam dua

---

<sup>35</sup> Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Jurnal Yuridika, Vol. 29, No.2, Mei-Agustus 2014, h.194-195

golongan, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pelaksanaan GCG bagi BUS harus mencakup 11 faktor berikut;<sup>36</sup>

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana, dan;
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

*Corporate Governance* merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard* dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk

---

<sup>36</sup> Any Eliza, "Analisa Peringkat Good Corporate Governance (GCG) Bank umum Syariah dan Pengaruhnya di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Risiko Bank" (Lampung: Permatanet, 2015), h.31-32

pembentukan GCG pada bank syariah, antara lain: 1). Sistem pengendalian intern; 2). Manajemen risiko; 2). Ketentuan yang mengarahkan pada peningkatan keterbukaan informasi; 4). Sistem akuntansi; 5). Mekanisme jaminan kepatuhan syariah; 6). Audit ekstern.<sup>37</sup>

Ke-enam perangkat di atas, pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah.

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, setidaknya terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

- a. Perlunya pengaktifan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa, dalam hal ini DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah
- b. Perlunya pengaktifan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini, permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu *fiqh* dan syariah, serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Nasirwan Ilyas, *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah*, ( Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2006 )

<sup>38</sup> Khotibul Umam, "*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.198

### 3. Teori – Teori *Good Corporate Governance*

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sejarah dan perkembangan *corporate governance*, teori mengenai *corporate governance* ini berkembang karena adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, hubungan keagenan (antara *agent* dengan *principal*) menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari biaya pengawasan oleh pemilik, biaya pengikatan agen, dan sisa kerugian yang harus ditanggung pemilik—misal akibat kesalahan pengambilan keputusan oleh agen.<sup>39</sup>

Dapat diamati bahwa perkembangan konsep mengenai *corporate governance* berdasarkan konsep dalam teori keagenan hanya terbatas pada masalah antara pemilik dana dengan pengelola dalam sebuah perusahaan swasta (korporasi). Munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori keagenan dalam tataran empiris, karena saat ini bukan hanya pemilik dana dan pemberi pinjaman saja yang harus diperhatikan, melainkan juga seluruh *stakeholder*, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Pemerintah atas pajak;
- b. Pemegang saham atas nilai perusahaan dan atau deviden serta hak suaranya;

<sup>39</sup> Michael C Jensen., William H. Meckling, *Loc.Cit.*,

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, “*Good Corporate Governance*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 27

- c. Pemberi pinjaman atas keamanan pengembalian pinjaman perusahaan;
- d. Karyawan atas gaji yang cukup untuk hidup, keadilan dalam kenaikan gaji dan posisi;
- e. Manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian kinerjanya;
- f. Pimpinan puncak atas keamanan jika perusahaan diakuisisi dan remunerasinya;
- g. Masyarakat atas lingkungan hidupnya, serta *public goods* yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, teori *corporate governance* diaplikasikan dengan perspektif-perspektif tertentu sesuai dengan tujuan didirikannya sebuah perusahaan serta struktur perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi berbagai perangkat *governance* yang dibutuhkan. Secara umum, perspektif dalam memahami *corporate governance* dapat dikategorikan menjadi dua paradigma yang sangat berbeda secara prinsipil, yaitu perspektif pemegang saham (*shareholding*) dan perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholding*) atau *shareholder value theory* dan *stakeholder theory*.<sup>41</sup>

Perspektif *shareholding* atau *shareholder value theory* dapat dianggap sebagai cara memandang perusahaan secara tradisional diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.31



tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.<sup>42</sup> Oleh karena itu menurut teori ini dalam kajian Smerdon yang dikutip oleh Sutedi, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya maka nilai (*value*) yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit.<sup>43</sup>

Adapun perspektif *stakeholding* atau *stakeholder theory* baru marak dibicarakan pada akhir abad ke-20 dengan diperkenalkannya konsep *stakeholder* oleh Freeman yang kontras dengan perspektif tradisional sebagaimana dalam *shareholding* atau *shareholder value theory*.<sup>44</sup> Freeman dalam hal ini menyatakan bahwa perusahaan adalah organ (*locus*) yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*), baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi *stakeholder* ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, dan masyarakat sekitar atau komunitas lokal di mana perusahaan beroperasi.<sup>45</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa berbagai perspektif dalam memahami *corporate governance* melandaskan pandangannya pada berbagai asumsi yang berbeda. Dengan dasar ini para akademisi telah

---

<sup>42</sup> Akhmad Syakhroza, *Op.Cit.*, h. 13

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Loc.Cit*

<sup>44</sup> Akhmad Syakhroza, *Op.Cit.*, h. 13-14

<sup>45</sup> Arifin, *Op.Cit.*, h. 12

mengembangkan penyesuaian-penyesuaian berbagai model teoretis atau *school of thought* yang bermacam-macam berdasarkan persepektif yang ada,<sup>46</sup> serta melakukan divergensi ataupun menganut paham konvergensi pada perspektif dan model-model *corporate governance*.

#### 4. Model - Model *Good Corporate Governance*

Terdapat dua model besar *corporate governance*, yaitu model *Anglo-Saxon* yang mempunyai hukum korporasi berbasis *common-law* dan model Eropa Kontinental (*Continental European*) yang mempunyai hukum korporasi berbasis *civil law*.<sup>47</sup> Terkait dengan model *corporate governance* yang berbeda, maka sistem yang akan digunakan dalam menjalankan konsep *corporate governance* juga berbeda. Model *Anglo-Saxon* dikenal pula sebagai *market-based system* atau *shareholder-value system* atau *principle-agent*.<sup>48</sup> Adapun model Eropa Kontinental dikenal sebagai model *stakeholder*.<sup>49</sup>

Pada negara-negara yang mengadopsi model *Anglo-Saxon*, sistem yang ditemukan adalah sistem dominasi pasar atau sistem berbasis pasar. Dalam sistem ini, pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomiannya. Pada negara yang menganut sistem ini, mekanisme pengendalian oleh kekuatan pasar bertindak sebagai pusat dari sistem kontrol perusahaan yang dianut. Dengan dasar ini,

---

<sup>46</sup> Akhmad Syakhroza, *Op.Cit.*, h. 14

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 16-17

<sup>48</sup> Hasan, Zulkifli, *Corporate Governance: Western and Islamic Persepectives*, International Review of Business Reasearch Papers, Vol. 5, No. 1, 2009, h. 280

<sup>49</sup> *Ibid.*, 281

mekanisme *governance* yang digunakan disebut sebagai sistem kontrol pihak eksternal (*outsider control system*).<sup>50</sup>

Model *Anglo-Saxon* atau *shareholder-value system* ini dianut oleh negara-negara dengan hukum korporasi berbasis *common-law*, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, New Zealand, Kanada, Afrika Selatan, dan mayoritas negara di Asia Tenggara. Model *Anglo-Saxon* berdasar pada konsep perusahaan yaitu hubungan antara pemegang saham dan manajer didorong oleh perilaku *profit oriented*.

Sistem *corporate governance* pada model *Anglo-Saxon* yang paling unik adalah pada struktur kepemilikan perusahaan di mana kepemilikan saham tersebar secara luas, namun pengaruh pemegang saham terhadap manajemen lemah. Hal tersebut menjadi alasan mengapa pada model *Anglo-Saxon* perusahaan membutuhkan perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi pemegang saham. Dengan kata lain, inti dari model *Anglo-Saxon* ini adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pemegang saham.<sup>51</sup>

Adapun pada negara-negara yang menganut model Eropa Kontinental, yaitu Jepang, Jerman, Prancis, Yunani, dan Korea Selatan,<sup>52</sup> dikategorikan sebagai penganut sistem *governance* yang didominasi oleh perbankan.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h.19

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.19

<sup>52</sup> Hasan, Zulkifli, *Op.Cit.*, h. 281

## 5. Urgensi *Good Corporate Governanace* pada Bank Syariah

Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditunjukkan kepada adanya tanggungjawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkn benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan dalam hukum positif yang khusus untuk bank syariah harus mematuhi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>53</sup>

Secara yuridis bank syariah bertanggungjawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola secara baik, profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.<sup>54</sup>

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut: 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 194

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.194

organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan; 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders; 4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi; 5) Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen; 6) Memimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan.<sup>55</sup>

Dengan demikian melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG

---

<sup>55</sup> Aldira Maradita, *Loc. Cit.*, h.195

pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern.<sup>56</sup>

#### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang berarti peninjauan kembali penelitian-penelitian lebih dulu ada yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka sendiri berfungsi untuk memperkuat karya ilmiah seseorang ataupun untuk membantah hasil dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian penulis yang dimuat dalam sebuah tabel sebagai berikut;

Tabel.4  
Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ade Sofyan Mulazid	Pelaksanaan <i>Shariah Compliance</i> pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta) (Jurnal)	1. Metode Kualitatif 2. Menggunakan jenis data primer dan sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan,

<sup>56</sup> *Ibid.*, h.195



			manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Selanjutnya direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya budaya kepatuhan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri menjadi semakin baik. <sup>57</sup>
Sepky Mardian	Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode analisis kualitatif</li> <li>2. Menggunakan jenis data sekunder</li> </ol>	Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Ke depan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan

<sup>57</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Shariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*, Jurnal Madania, Vol.20, No.1, Juni 2016, h. 37

			ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi. <sup>58</sup>
Luqman Nurhisam	Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) dalam Industri Keuangan Syariah (Jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian Kualitatif</li> <li>2. Metode Penelitian Normatif</li> <li>3. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan</li> </ol>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah ( <i>sharia compliance</i> ), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah ( <i>sharia compliance</i> ) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. <sup>59</sup>
Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarasri	Analisis Pengaruh Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah pada Prinsip Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode analisis kuantitatif</li> <li>2. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan, dan kuesioner.</li> <li>3. Pengukuran hasil kuesioner</li> </ol>	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ , sebesar $0,550 < 3,806$ jadi $H_0$ diterima, berarti tidak berpengaruh antara variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan. <sup>60</sup>

<sup>58</sup> Sepky Mardian, *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1, 2015, h.66

<sup>59</sup> Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol., No.1, 23 Januari 2016, h. 77

<sup>60</sup> Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarasri, *Analisis Pengaruh Pengungkapan Shariah Compliance terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah pada Prinsip Syariah*, Jurnal Maksimum, Vol.4, No.1, September 2013-Februari 2014, h.27

		menggunakan Skala <i>Likert</i> .	
Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis	Analisis Pengungkapan <i>Sharia Compliance</i> dalam Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah di Indonesia (Jurnal)	1. Jenis penelitian kualitatif 2. Menggunakan data sekunder laporan GCG 10 BUS di Indonesia tahun 2011.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah mengungkapkan <i>sharia compliance</i> dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dengan prosentase lebih dari 50%. BUS yang memiliki indeks pengungkapan <i>sharia compliance</i> lebih dari 50% adalah BUS yang memiliki masa operasi lebih dari 4 (empat) tahun yaitu BSM, BMI, BRIS, BMS kecuali BCAS yang baru memiliki masa operasi 2 (dua) tahun. <sup>61</sup>

Berdasarkan data tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan antara ke-lima tinjauan pustaka di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu;

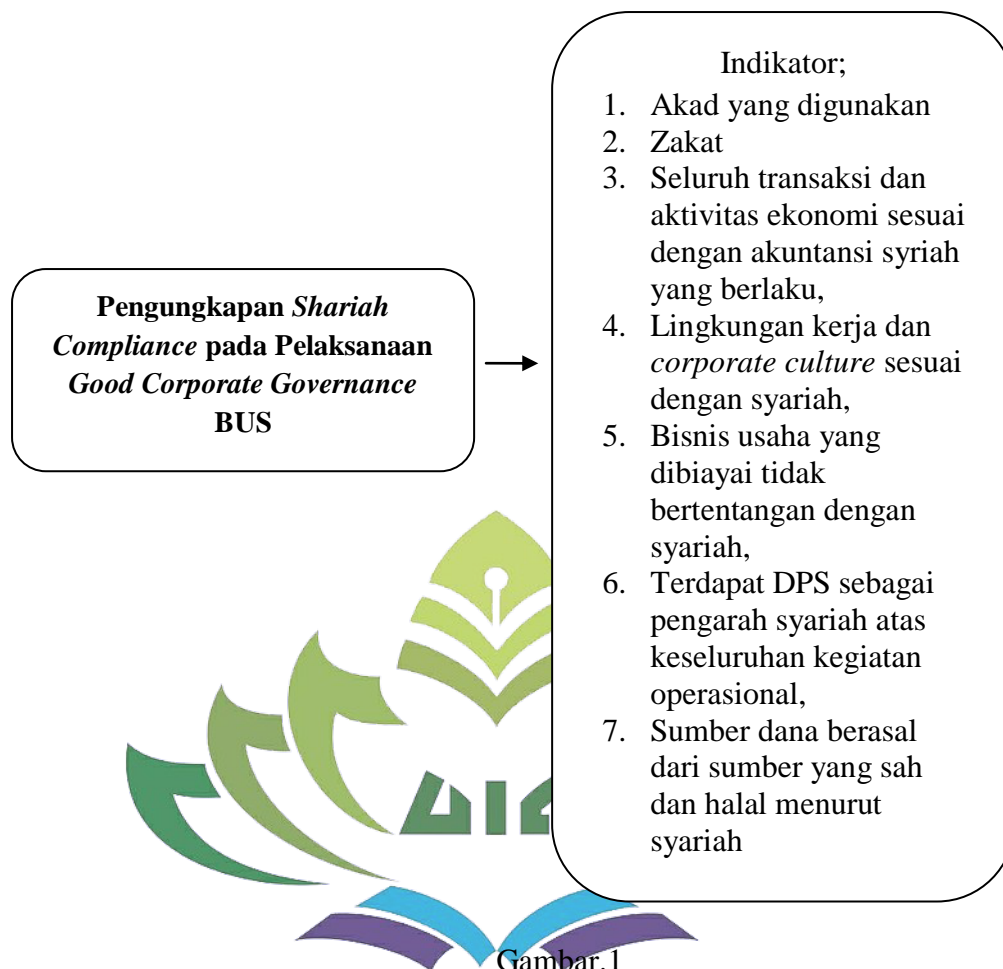
1. Persamaan, untuk persamaan penelitian yang membahas *sharia compliance* dari bank umum syariah, memiliki beberapa sumber-sumber referensi yang sama dalam karya penulisan, serta memakai teknik analisis deskriptif kualitatif pada metodologi penelitiannya.

<sup>61</sup> Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, *Op.Cit.*, h.122

2. Perbedaan, dari ke-lima penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah, sumber laporan tahunan BUS penelitian, jumlah laporan yang diteliti, serta terdapat perbedaan indikator yang diteliti. Lebih lanjut, penelitian penulis lebih bersifat spesifik (tidak secara luas) dan khusus, serta metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah analisis deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian normatif.



## F. Kerangka Berpikir

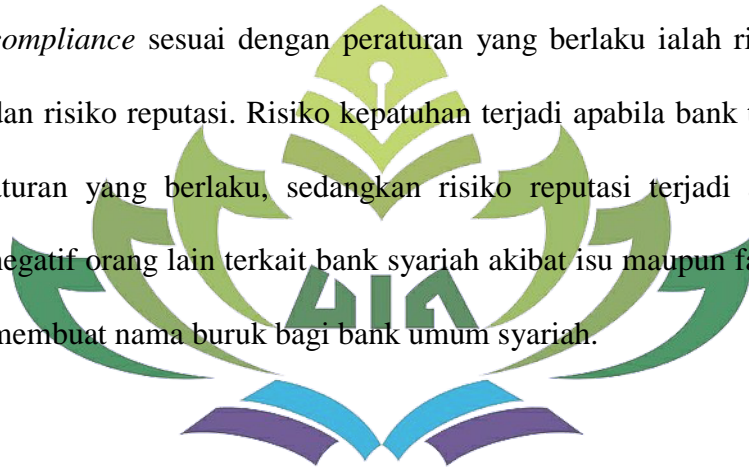


Gambar.1  
Kerangka Berpikir

Berdasarkan indikator-indikator di atas, dapat di analisis bahwa antara *syariah compliance* dan GCG memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. *Shariah Compliance* merupakan pembeda antara GCG dari bank konvensional dan bank syariah. Pada laporan tahunan dan laporan GCG bank syariah wajib mengungkapkan indikator-indikator dari *syariah compliance*. Dasar hukum yang digunakan ialah peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan judul penelitian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah bank umum syariah di Indonesia telah mengungkapkan

*shariah compliance* pada pelaksanaan GCG nya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengungkapan *shariah compliance* wajib dilakukan oleh pihak bank, untuk memberikan informasi kepada semua pembaca *annual report* dan laporan GCG dari masing-masing bank umum syariah di Indonesia, sehingga para pembaca dapat menilai apakah bank tersebut sudah benar-benar syariah secara keseluruhan atau tidak, yang kemungkinan dapat menimbulkan risiko.

Risiko yang dapat terjadi apabila bank tidak mengungkapkan *shariah compliance* sesuai dengan peraturan yang berlaku ialah risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Risiko kepatuhan terjadi apabila bank tidak mematuhi aturan yang berlaku, sedangkan risiko reputasi terjadi akibat persepsi negatif orang lain terkait bank syariah akibat isu maupun fakta yang dapat membuat nama buruk bagi bank umum syariah.





## BAB III

### PENYAJIAN DATA PENELITIAN


#### A. Profil Singkat Bank Umum Syariah di Indonesia

##### 1. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 278 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic*

*Payment* (MEPS). Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.<sup>1</sup>

## 2. Bank Syariah Mandiri



Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998 membuat pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu bank dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU No.10 tahun 1998, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastruktur menjadi bank yang beroperasi berdasarkan

---

<sup>1</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, *Profil Perusahaan - Riwayat Singkat Bank Muamalat Indonesia*, 2017, h.48 - 49

prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>2</sup>

### 3. Bank BRISyariah

Sejarah pendirian PT Bank BRISyariah (selanjutnya disebut BRISyariah atau Bank) tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islami. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari

---

<sup>2</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan*, 2017, h.55

2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah. BRISyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan berbagai segmen di masyarakat. Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRISyariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk menumbuhkan *brand equity* BRISyariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. BRISyariah juga memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

#### 4. Bank BNI Syariah

Bank BNI Syariah merupakan hasil dari *spin off* Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia (BNI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 2000 dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Unit Usaha Syariah BNI kemudian terus berkembang menjadi 28 Kantor

---

<sup>3</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank BRISyariah, *Profil Perusahaan – Sekilas BRISyariah*, 2017, h. 53

Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Kemudian dalam *Corporate Plan* BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat sementara dan direncanakan akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana *spin off* tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah. Hingga Juni 2014, jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 20 *Payment Point*.<sup>4</sup>

## 5. Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini,

---

<sup>4</sup> Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah, *Profil Perusahaan – Riwayat Bank BNI Syariah*, 2017, h. 52

bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank bekerjasama dengan MoneyGram International dalam hal pengiriman uang secara cepat. Pada tahun 2013, bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.<sup>5</sup>

## 6. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk. diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Pada tahun 2008 diperoleh izin kegiatan usaha melalui surat keputusan Gubernur BI Nomor. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Pada tahun 2009 penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Bukopin, Tbk. ke dalam Perseroan pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan dari BI melalui surat Nomor. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009, sebagaimana akta Nomor. 18 tanggal 18 Juni 2009 oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH.

---

<sup>5</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah, *Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perseroan*, 2017, h. 36



Sampai dengan akhir Desember 2017, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 5 (lima) unit mobil kas keliling, dan 97 (sembilan puluh tujuh) Kantor Layanan Syariah, serta 32 (tiga puluh dua) mesin *Automated Teller Machine* (ATM) BSB dengan jaringan Prima BCA.<sup>6</sup>

## 7. Bank Panin Syariah (Bank Panin Dubai Syariah)

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama berturut-turut. Terakhir, Pada tahun 2016 nama diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama

---

<sup>6</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan – Riwayat Singkat*, 2017, h. 59 - 60

baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.<sup>7</sup>

## 8. Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah didirikan pada tanggal 6 Agustus 2009, yang merupakan hasil akuisisi dari PT Bank Swaguna yang telah berdiri sejak tanggal 15 April 1966. Perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah diperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, yang mana kepemilikan saham PT Bank Victoria International, Tbk pada Bank Victoria Syariah sebesar 99,99%. Beberapa capaian pada akhir tahun 2017 antara lain mengelola aset sebesar +/- Rp. 2 Triliun dan selama setahun pada 2017 berhasil membukukan laba bersih sebesar +/- Rp 5 Milyar di mana sebelumnya 2 (dua) tahun berturut-turut masih rugi.<sup>8</sup>

## 9. Bank BCA Syariah

Bank BCA Syariah lahir dari proses akuisisi PT Bank Utama International Bank (UIB) oleh PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA)

---

<sup>7</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah, *Profil Perusahaan – Sejarah Singkat Perusahaan*, 2017, h. 28-29

<sup>8</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Victoria Syariah, *BAB I – Sejarah Singkat Bank Victoria Syariah*, 2017, h. 10

pada tanggal 12 Juni 2009. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2009 PT Bank UIB diubah namanya menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009. Hingga tahun 2017, BCAS telah melayani 45.151 nasabah melalui 57 jaringan kantor cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 9 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 6 Kantor Fungsional (KF) BUR, dan 31 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan dan Palembang.<sup>9</sup>

#### **10. Bank Maybank Syariah Indonesia**

Sejarah berdirinya PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah” atau “Bank”) berawal pada tahun 1994 saat terjadi joint venture dua bank konvensional dari dua negara, yakni Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional dengan nama PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 september 1994. Sebagai bank konvensional, PT Bank Maybank Indocorp menghadirkan beragam jasa perbankan, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial, sebelum menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia

---

<sup>9</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah, *Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan*, 2017, h. 32

(Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.<sup>10</sup>

## **B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha bank. Tata kelola perusahaan yang baik akan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bagi nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terpelihara dan meningkat, maka setiap bank syariah wajib memiliki komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

Seperti yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa pada dasarnya GCG bank syariah dan bank konvensional memiliki prinsip-prinsip yang sama lima prinsip dasar *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran.<sup>11</sup> Pembedanya ialah ada bank syariah

<sup>10</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Maybank Syariah, *Profil Perusahaan – Sekilas Maybank Syariah*, 2017, h. 26

<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, “*Penjelasan Atas*”, 2009, h.1

terdapat *shariah compliance* yang aturannya telah ditetapkan oleh DSN-MUI serta pengawasannya dilakukan oleh DPS. Lebih lanjut, menurut Surat Edaran BI No.12/13/DPbs, tanggal 30 April 2010 perbedaannya selanjutnya yaitu pada bank syariah terdapat 11 (sebelas) indikator perihal pelaksanaan GCG bank umum syariah, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan laporan GCG pada 10 bank umum syariah di Indonesia tahun 2017, bahwa ke sepuluh bank tersebut menerapkan aturan GCG sesuai dengan 5 (lima)

---

<sup>12</sup> Any Eliza, "Analisa Peringkat Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Risiko Bank" (Permatanet: Bandar Lampung, 2015), h.31-32

aturan prinsip yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan GCG tiap-tiap bank umum syariah yang tersedia.

Lebih lanjut, pada laporan GCG bank umum syariah pula memuat sebelas indikator yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dapat dilihat pada daftar isi tiap-tiap bank umum syariah. Yang menjadi pembedanya ialah, cara bank dalam menyampaikan informasi terkait sebelas indikator tersebut.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Muamalat dilakukan secara *sustainable* dimulai dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman pada semua lini unit kerja bank tentang arti penting dari penerapan GCG, masing-masing fungsi yang dijalankan diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan praktik GCG, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

---

<sup>13</sup> Laporan GCG Bank Muamalat, *Pernyataan Tata Kelola Perusahaan*, 2017, h.6



- c. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank.
- d. Secara berkesinambungan melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada pejabat dan pegawai.
- e. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*), budaya risiko dan budaya anti fraud di lingkungan Bank.
- f. Melakukan sosialisasi kode etik perusahaan dan corporate culture yang Islami,
- g. Setiap karyawan diwajibkan untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti *fraud* secara berkala.
- h. DPS dan *Compliance* Syariah melakukan pengawalan terhadap penerbitan produk dan aktivitas Bank agar sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Mandiri mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui:<sup>14</sup>

- a. Komitmen GCG

Tahapan awal dalam implementasi GCG adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam

---

<sup>14</sup> Laporan GCG Bank Syariah Mandiri, *Mekanisme Tata Kelola Perusahaan*, 2017, h. 6

implementasi GCG. Bentuk implementasi komitmen GCG bersama dimulai membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi GCG seperti; Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, *Code of Conduct*, dan GCG *charter*.

b. Struktur GCG

BSM melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. Mekanisme GCG

Prinsip-prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan prinsip-prinsip GCG benar benar terlaksana dalam *governance process*.

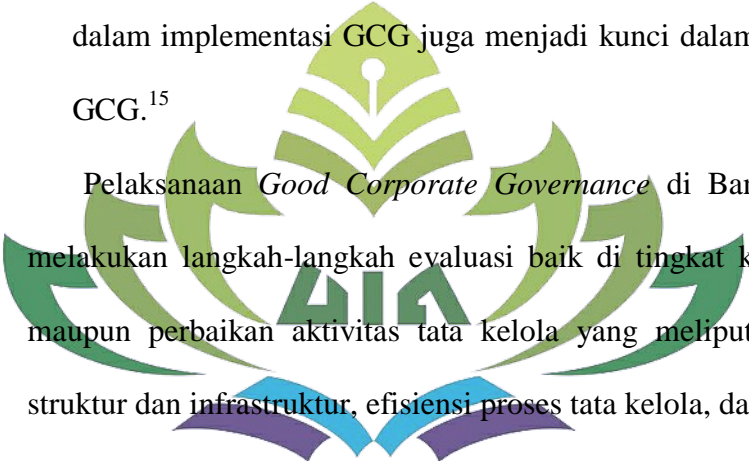
d. Sosialisasi dan evaluasi

Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah mensosialisasikannya kepada jajaran perusahaan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan GCG dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana implementasi

GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan implementasi GCG kedepan secara berkelanjutan.

e. Keberlanjutan

Keberhasilan implementasi GCG tidak didapatkan secara instan, konsistensi dan keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip GCG menjadi kunci penting dalam implementasi GCG. Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki implementasi GCG yang telah berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam implementasi GCG juga menjadi kunci dalam keberlanjutan GCG.<sup>15</sup>

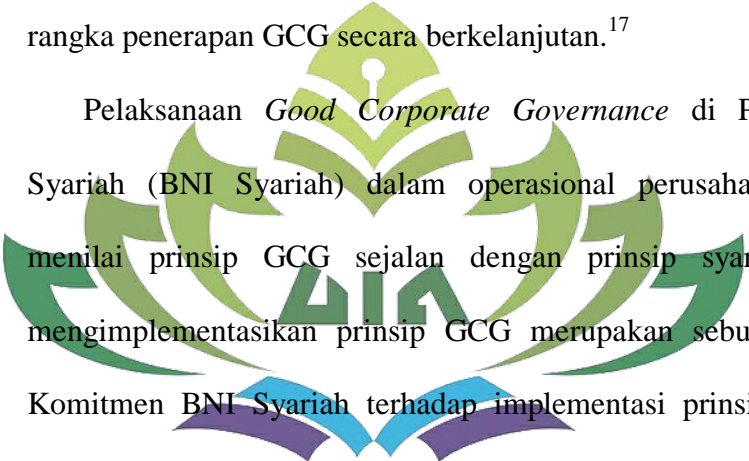


Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank BRISyariah melakukan langkah-langkah evaluasi baik di tingkat kesehatan bank maupun perbaikan aktivitas tata kelola yang meliputi kelengkapan struktur dan infrastruktur, efisiensi proses tata kelola, dan kualitas hasil tata kelola. Dalam rangka mengimplementasikan GCG terintegrasi, Bank BRISyariah telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama. Pelaksanaan GCG yang baik dan konsisten akan memberikan manfaat antara lain, sebagai berikut: (1) Melindungi kepentingan *stakeholders*, (2) Mengarahkan BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan bank untuk menjamin kelangsungan usaha dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*, (3) Memberikan arahan strategis dalam mendukung

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.7

tercapainya visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, dan (4) Menghindari timbulnya berbagai macam risiko yang tidak terbatas pada risiko reputasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.<sup>16</sup> Langkah-langkah evaluasi dan perbaikan tata kelola yang dilakukan bank antara lain dengan cara mengkinikan dan menyempurnakan kembali kelengkapan struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kebijakan-kebijakan bank dalam rangka penerapan GCG secara berkelanjutan.<sup>17</sup>



Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dalam operasional perusahaan sehari-hari menilai prinsip GCG sejalan dengan prinsip syariah, sehingga mengimplementasikan prinsip GCG merupakan sebuah kebutuhan. Komitmen BNI Syariah terhadap implementasi prinsip GCG dapat dilihat dalam melakukan penyempurnaan struktur dan proses implementasi GCG secara berkelanjutan, dengan prinsip selalu ada ruang untuk perbaikan. BNI Syariah meyakini bisnis yang dijalankan dengan kesempurnaan implementasi GCG (*GCG Excellence*) akan lebih memungkinkan untuk tetap kokoh dan *sustain* dalam jangka panjang. Tahun 2017, BNI Syariah tetap menjalankan kegiatan perusahaan berlandaskan kepada kerangka implementasi GCG

---

<sup>16</sup> Laporan GCG Bank BRISyariah, *Pendahuluan*, 2017, h.1-2

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.3

disandingkan dengan prinsip-prinsip GCG serta Nilai-Nilai Syariah yaitu nilai *Hasanah* dan nilai *Maqoshid* Syariah.<sup>18</sup>

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Mega Syariah bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk nilai-nilai etika dan penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*). Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Mega Syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar. Bank Mega Syariah menerapkan prinsip kewajaran dengan cara memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan. Dan dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, menilai kecukupan dan efektivitas atas aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*.<sup>19</sup>

Pelaksanaan GCG pada bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG bank umum syariah. Dalam rangka

<sup>18</sup> Laporan GCG Bank BNI Syariah, *Komitmen Pelaksanaan GCG*, 2017, h.2-3

<sup>19</sup> Laporan GCG Bank Mega Syariah, *Proses Penilaian GCG*, 2017, h.4

melaksanakan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka bank telah melaksanakan *Self Assessment* tentang pelaksanaan GCG yang meliputi sebelas aspek penilaian sesuai dengan ketentuan BI, bankbukopin syariah memberi nilai 1,50 atau sama dengan predikat “baik” dalam nilai kompositnya.<sup>20</sup>

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Panin Dubai Syariah, kepatuhan bank terhadap ketentuan regulasi, penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal menjadi bentuk konsistensi Bank dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan GCG. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuran risiko sesuai prinsip kehati-hatian, proses pengambilan keputusan yang transparan, penguatan pengawasan monitoring, serta pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabel dan independen, dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Pertanggungjawaban, (4) Profesional, (5) Kewajaran.<sup>21</sup>

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Victoria Syariah berdasarkan pada Peraturan BI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 prinsip dasar GCG

---

<sup>20</sup> Laporan GCG Bank Syariah Bukopin, *Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan GCG PT. Bank Syariah Bukopin*, 2017, h.1

<sup>21</sup> Laporan GCG Bank Panin Dubai Syariah, *Pendahuluan*, 2017, h.1-2



sebagai berikut; (1) Keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, (2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, (3) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, (4) Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah, (5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Output* yang baik. Dan, dalam rangka mengimplementasikan GCG terintegrasi, bank telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama.<sup>22</sup>

Bank BCA Syariah menerapkan GCG dengan menggunakan 5 prinsip dasar, yaitu; (1) Keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, (2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, (3) Pertanggungjawaban, yaitu

---

<sup>22</sup> Laporan GCG Bank Victoria Syariah, *Pendahuluan*, 2017, h.3- 4

kesesuaian pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, (4) Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah, (5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan GCG Bank BCA Syariah tahun 2017 merupakan proses yang berkesinambungan dari pelaksanaan GCG tahun sebelumnya dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen bank kepada seluruh pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja BCA Syariah dan meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM;
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggungjawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan syariah sesuai prinsip GCG;
- c. Meningkatkan seluruh organ GCG BCA Syariah untuk melindungi bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Maybank Syariah Indonesia, sesuai Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>23</sup> Laporan GCG Bank BCA Syariah, *Pelaksanaan GCG Bank BCA Syariah*, 2017, h.1- 4

No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu. Berdasarkan *self assessment* dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) posisi Desember 2017, peringkat GCG Bank adalah ”2” atau ”Baik”. Secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank semakin membaik ditandai dengan upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan strategis yang telah menunjukkan hasil yang baik dan mampu meningkatkan kinerja Bank.<sup>24</sup>




---

<sup>24</sup> Laporan GCG Bank Maybank Syariah, *Pendahuluan dan Hasil Assessment*, 2017, h.2-

## BAB IV

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017**

Pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG di teliti berdasarkan dengan indikator-indikator yang telah di jelaskan berikutnya yakni (1) Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (2) Dana zakat dihitung dan dibayar dikelola dengan aturan prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku, (4) lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, (5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) terapat DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional, dan (7) sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.<sup>1</sup> Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti lima (5) dari tujuh (7) indikator di atas dikarenakan ketidak mampuan penulis akibat ketidakmungkinan untuk meneliti keseluruhan indikator dikarenakan tidak tersedianya informasi pada laporan keuangan dan laporan GCG bank umum syariah.

Metode yang digunakan dalam mengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG BUS di Indonesia penulis menggunakan metode

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, “Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum” (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.146

*scoring*. Metode *Scoring* atau *Weighted Linear Combination* (WLC) digunakan untuk merepresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak tertentu pada suatu fenomena secara spesial.<sup>2</sup> Setiap parameter masukan akan diberikan skor dan kemudian akan dijumlahkan untuk memperoleh tingkat keterkaitan.<sup>3</sup> *Scoring* dilakukan untuk mencari poin pengungkapan yang dinilai dengan 1 jika diungkapkan dan 0 atau kosong jika tidak diungkapkan dari item pengungkapan yang telah dijabarkan dalam tabel indikator penelitian. Kemudian dari hasil uji *checklist* tersebut dilakukan perhitungan indeks.<sup>4</sup> Indeks pengungkapan *sharia compliance* dihitung berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Muhammad Ali dibawah ini;

$$NP (\%) = \frac{n1}{N0} \times 100\%$$

Keterangan;

1. NP = indeks pengungkapan *sharia compliance* oleh bank syariah melalui laporan tahunannya;
2. n = banyaknya item *sharia compliance* yang telah diungkapkan oleh BUS;
3. N = banyaknya item yang seharusnya diungkapkan oleh BUS.<sup>5</sup>

Berikut pengungkapan *sharia compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2017 berdasarkan indikator-indikator di atas;

<sup>2</sup> S.Drobne dan A. Lisec, "Multi-attribute Decision Analysis in GIS: Weighted Linear Combination and Ordered Weighted Averaging" (Informatica, 2009),h.459-474

<sup>3</sup> Dony M. Sihotang, *Metode Scoring dan Metode Fuzzy*, Jurnal JNTETI, Vo.5, No.4, November 2016, h.303

<sup>4</sup> Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, *Analisis Pengungkapan Shariah Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.2, No.2, Tahun 2014, h.116

<sup>5</sup> Muhammad Ali, "Penelitian Pendidikan" (Bandung: Angkasa Bandung, 1987) , h.184

1. Indikator Pertama : Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah tahun 2017;

Tabel.5  
Pengungkapan Sub-indikator Akad yang Digunakan BUS

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	<b>Pengumpulan Dana;</b> a. Giro (Akad <i>Wadiah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Tabungan 1). Akad <i>wadi'ah</i> atau akad lain	1	1	1	1	1		1	1	1	
	2). Akad <i>Mudharabah</i> atau akad lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Deposito (Akad <i>Mudharabah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	<b>Penyaluran Dana;</b> a. Jual Beli (Akad <i>Murabahah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Pembiayaan Bagi Hasil 1) <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2) <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Pembiayaan Lain 1) Sewa Beli ( Akad <i>Ijarah Muntahiyah Bittamblik</i> )	1	1	1					1		
	2) Pinjaman dalam bentuk piutang ( Akad <i>Qardh</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3) Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1		1

Sumber = data diolah, 2018

Berdasarkan indikator pertama, dapat dianalisis bahwa pengungkapan akad yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah tertinggi dipegang oleh Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah, dan Bank Muamalat



Indonesia, dengan total skor pengungkapan 10 dari keseluruhan 10 sub indikator pengungkapan. Selanjutnya, dengan total skor pengungkapan 9 yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Mega Syariah. Selanjutnya, dengan total skor pengungkapan 8 yaitu Bank Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Panin Dubai Syariah. Terakhir, dengan total skor pengungkapan 7 di pegang oleh Bank Victoria Syariah.

Acuan dengan dasar hukum yang digunakan penulis dalam indikator pertama ini ialah UU No.21 Tahun 2008, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 – 111 Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), di mana pada UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 23 menjelaskan bahwa Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil penelitian penulis, kesepuluh bank telah menjalankan produk giro sesuai dengan aturan yang ada, dapat dilihat pada penjelasan laporan keuangan masing-masing BUS terkait produk simpanan giro pada tahun 2017.

Selanjutnya pada produk tabungan, sesuai dengan peraturan UU No.21 Tahun 2008 Pasal 21 Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>7</sup> Hal ini didukung pula dengan PSAK No. 102 Tahun 2007 tentang *Murabahah*,<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 23 tentang Giro, h.5

<sup>7</sup> UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 21 tentang Tabungan, h.5

<sup>8</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 103 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Murabahah*

serta PSAK No.103 Tahun 2007 tentang *Mudharabah*,<sup>9</sup> bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa sepuluh BUS telah menerapkan produk tabungan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku, dapat dilihat pada penjelasan laporan keuangan masing-masing BUS terkait produk tabungan pada tahun 2017, walau ada beberapa bank yang tidak menerapkan tabungan dengan akad *wadiah*.

Selanjutnya pada produk deposito, menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 22 tentang Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian, kesepuluh bank telah menerapkan akad *mudharabah dan musyarakah* pada produk tabungan mereka, dapat dilihat pada penjelasan laporan keuangan masing-masing BUS terkait produk deposito pada tahun 2017.

Pada kegiatan transaksi jual beli, menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25 C, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*.<sup>11</sup> Namun, penulis hanya mencatumkan akda *murabahah* saja, karena akad itu merupakan akad umum yang biasa ada di setiap BUS. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesepuluh bank telah menerapkan akad *murabahah* pada kegiatan transaksi jual beli mereka. dapat dilihat pada penjelasan laporan

---

<sup>9</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 102 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Mudharabah*

<sup>10</sup> UU No.21 Tahun 2008 Pasal 22 tentang Deposito, h.5

<sup>11</sup> UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25 Butir C tentang Transaksi Jual Beli, h.5

keuangan masing-masing BUS terkait transaksi jual beli (piutang) pada tahun 2017.

Selanjutnya, pada pembiayaan bagi hasil, menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25 A, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian, pada kesepuluh BUS, telah menerapkan pembiayaan pada ke dua akad di atas, dapat dilihat pada penjelasan laporan keuangan masing-masing BUS terkait transaksi pembiayaan bagi hasil pada tahun 2017.

Pada transaksi sewa menyewa, menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25 B, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian, kesepuluh bank telah menerapkan dua akad di atas untuk transaksi sewa menyewa. Hal ini didukung pula dengan PSAK No. 107 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Ijarah*.<sup>14</sup> Walaupun ada beberapa BUS yang tidak menerapkan akad IMBT pada transaksi sewa menyewanya. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan laporan keuangan masing-masing BUS terkait transaksi pembiayaan bagi hasil pada tahun 2017.

Terakhir, untuk piutang *qardh*, menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25 D, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian, sembilan dari sepuluh BUS telah menerapkan akad *qardh* kecuali pada Bank Victoria Syariah, dapat

<sup>12</sup> UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25 Butir A tentang Transaksi Bagi Hasil, h.5

<sup>13</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 Butir B tentang Transaksi Sewa Menyewa, h.5

<sup>14</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No.107 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Ijarah*

<sup>15</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 Butir D tentang Transaksi Pinjaman dalam Bentuk Piutang, h.5

dilihat pada penjelasan laporan keuangan masing-masing BUS terkait transaksi pembiayaan bagi hasil pada tahun 2017.

2. Indikator ke-dua : Pengelolaan dana zakat bank umum syariah tahun 2017;

Tabel.6  
Pengungkapan Sub-indikator Pengelolaan Zakat

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat										
2.	Periode laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1			1	1	1	1
3.	Sumber dana zakat	1	1	1	1			1	1	1	1
4.	Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1			1	1	1	1
5.	Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1			1	1	1	
6.	Saldo awal dan akhir dana zakat <sup>16</sup>	1	1	1	1			1	1	1	1

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan indikator ke dua, dengan mengacu pada sub indikator yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengenai dana zakat ,dapat ditarik dianalisis bahwa pengungkapan pengelolaan dana zakat, delapan dari sepuluh BUS masing-masing mengungkapkan lima dari total enam sub indikator yang harus di ungkapkan. Sedangkan pada Bank Syariah Bukopin dan Bank Maybank Syariah Indonesia tidak terdapat informasi

<sup>16</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan, h.101.21

mengenai pengelolaan zakat pada laporan keuangan maupun laporan GCG nya.

3. Indikator ke-tiga : Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah tahun 2017 dengan menggabungkan sub indikator penelitian dari Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis yaitu;<sup>17</sup>

Tabel 7  
Pengungkapan Sub-indikator Keberadaan DPS BUS

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	CV DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Foto DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi										
6.	Masa jabatan DPS	1	1	1		1		1	1		1
7.	Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Waktu penyampaian laporan										
10.	Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

<sup>17</sup> Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.2, No.2, Tahun 2014, h.107

11.	Jumlah rapat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Risalah rapat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Patuh pada larangan pemanfaatn BUS untuk kepentingan pribadi	1	1	1	1	1		1	1	1	1
15.	Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan		1	1					1		
17.	Opini DPS yang di <i>publish</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan indikator ke tiga, dengan mengacu pada sub indikator dari gabungan penelitian yang di lakukan oleh T Vinnicombe pada tahun 2010 dan Sepky Mardian pada tahun 2011, dapat di analisis bahwa pengungkapan keberadaan DPS tertinggi di pegang oleh Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah, dan Bank Mumalat Indonesia, dengan skor pengungkapan 15 dari total 17 yang ada. Selanjutnya dengan total 14 skor pengungkapan di pegang oleh Bank BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Lalu dengan skor pengungkapan 13 di pegang oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Panin Dubai Syariah. Terakhir yaitu Bank Maybank Syariah Indonesia hanya mengungkapkan 12 sub indikator dari total 17 sub indikator yang harus diungkapkan.



4. Indikator ke-empat: Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku;

a. Neraca<sup>18</sup>

Tabel 8  
Pengungkapan Sub-Indikator Neraca

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	Kas dan setara kas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Aset keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Piutang usaha dan piutang lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persediaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Investasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Aset tetap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Aset tak berwujud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Hutang usaha dan hutang lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Hutang pajak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Dana syirkah temporer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Hak minoritas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Modal saham dan pos ekuitas lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan indikator ke-empat terkait pengungkapan laporan neraca berdasarkan PSAK No.101 dengan tabel hasil pengungkapan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kesepuluh BUS, tujuh di

<sup>18</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Op.Cit.*, h.101.16

antaranya telah mengungkapkan keseluruhan dari 12 sub indikator yang harus diungkapkan, sedangkan bank BSM hanya mengungkapkan 11 sub indikator, dan bank BMSI serta bank BVS hanya mengungkapkan 10 sub indikator.

b. Laporan Laba Rugi<sup>19</sup>

Tabel 9  
Pengungkapan Sub-Indikator Laporan L/R

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	Pendapatan usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Basil untuk pemilik dana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Beban usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Laba/Rugi usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.	Pendapatan dan beban non-usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Laba/Rugi dari aktivitas normal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Beban pajak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Laba/Rugi untuk periode berjalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan indikator ke-empat terkait pengungkapan laporan laba rugi berdasarkan PSAK No.101 dengan tabel hasil pengungkapan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kesepuluh BUS, sembilan BUS telah mengungkapkan keseluruhan (8) sub indikator yang harus di

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.101.18-19

ungkapan, sedangkan Bank Victoria Syariah hanya mengungkapkan lima dari total delapan sub indikator yang harus di ungkapkan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas<sup>20</sup>

Tabel 10  
Pengungkapan Sub-indikator Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	Laba/Rugi bersih periode yang bersangkutan	1	1	1	1		1	1	1	1	
2.	Pendapatan dan beban, keuntungan dan kerugian beserta jumlahnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.	Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan dan perbaikan kesalahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.	Transaksi modal dengan pemilik, dan distribusi kepada pemilik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.	Saldo akumulasi laba/rugi pada awal dan akhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.	Rekonsiliasi nilai tercatat dari modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode	1	1	1				1		1	

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan indikator ke-empat terkait pengungkapan laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAK No.101 dengan tabel hasil

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.101.20

pengungkapan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kesepuluh BUS, hanya lima BUS yang mengungkapkan keseluruhan sub indikator, yaitu bank BCAS, BNIS, BRIS, BMS, BPS. Pada bank BSM, BMSI, dan bank BMI hanya mengungkapkan lima sub indikator, dan pada bank BSB hanya mengungkapkan empat sub indikator. Sedangkan pada bank BVS tidak ada sub indikator yang diungkapkan, dikarenakan pada bank tersebut tidak tersedia informasi terkait laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Sumber Dana Kebajikan<sup>21</sup>

Tabel 11  
Pengungkapan Sub-Indikator Laporan Sumber Dana Kebajikan

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M I	B P S	B V S
1.	Sumber dana kebajikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Penggunaan dana kebajikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.	Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan	1		1	1	1	1	1		1	
4.	Saldo awal dana penggunaan	1		1	1	1	1	1		1	
5.	Saldo akhir dana penggunaan	1		1	1	1	1	1		1	

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan indikator ke-empat terkait pengungkapan laporan sumber dana kebajikan berdasarkan PSAK No.101 dengan tabel hasil pengungkapan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kesepuluh BUS, hanya tujuh BUS yang mengungkapkan keseluruhan dari sub

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.101.22-23

indikator di atas, yaitu bank BCAS, BRIS, BSM, BSB, BMSI, BMS, dan bank BPS, lalu pada bank BNIS dan bank BMI hanya mengungkapkan dua dari total lima sub indikator, sedangkan pada bank BVS tidak ada sub indikator yang diungkapkan, dikarenakan pada bank tersebut tidak tersedia informasi terkait laporan sumber dana kebajikan.

Berdasarkan indikator ke-empat dengan total 4 sub indikator yang harus diungkapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya empat BUS yang mengungkapkan keseluruhan sub indikator, yaitu Bank BCA Syariah, Bank BRISyariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah

5. Indikator ke-lima: Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, yaitu dengan sub-indikator sebagai berikut;

Tabel.12  
Pengungkapan Sub-Indikator Bisnis Usaha yang Dibiayai Tidak Bertentangan dengan Syariah

No.	Sub Indikator	Bank Umum Syariah									
		B C A S	B N I S	B R I S	B S M	B S B	B M S I	B M S	B M M	B P S	B V S
1.	Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : data diolah, 2018

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *dzalim*.<sup>22</sup> Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa ke- sepuluh bank telah mengungkapkan bahwa bisnis yang mereka biayai kepada nasabah tidak mengandung ke-lima unsur di atas. Pada umumnya bisnis yang dibiayai oleh bank umum syariah dengan menggunakan produk masing-masing BUS dengan akad syariah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain; pertanian, perdagangan, transportasi, *real estate*, administrasi pemerintahan, konstruksi, periklanan, pertambangan, dll selama bisnis yang dijalankan tidak dianggap haram baik dari proses maupun hasilnya. Karena pada dasarnya, pada BUS terdapat Standar Operasional Perusahaan yang dengan tegas melarang terdapatnya lima unsur tersebut dalam produk bank syariah.

## **B. Analisis Pengungkapan *Shariah Compliance* pada Pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017**

Berdasarkan hasil *scoring* dari lima indikator pengungkapan *shariah compliance* dalam pelaksanaan GCG pada bank umum syariah, maka

---

<sup>22</sup> Rahmadi Usman, “*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.116

penulis dapat memperoleh kesimpulan nilai *scoring* di atas dengan hasil sebagai berikut;

Tabel 12  
Data Hasil *Scoring*

No.	Indikator	Bank Umum Syariah									
		BC AS	BN IS	BR IS	BS M	BS B	B MS I	B MS	B MI	BP S	BV S
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana	10	10	10	9	9	8	9	10	8	7
2.	Pengelolaan zakat	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
3.	Dewan Pengawas Syariah	14	15	15	13	14	12	14	15	13	14
4.	Pelaporan transaksi dan aktivitas ekonomi	31	28	31	29	29	28	31	27	31	15
5.	Bisnis sesuai dengan syariah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>n<sub>1</sub></b>		65	63	66	61	57	53	64	62	62	46
<b>N<sub>0</sub></b>		<b>70</b>									
<b>NP</b>		92	90	94	87	81	76	91	88	88	65
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan nilai *scoring* di atas, maka selanjutnya penulis dapat melakukan analisis data, berdasarkan pada Laporan *Good Corporate Goveranance* dan *Annual Report* tahun 2017 pada masing-masing bank



umum syariah mengenai pengungkapan *shariah compliance*, 5 dari 7 indikator yang diteliti, indikator ke-tiga yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan indikator dengan total pengungkapan yang paling rendah tingkat pengungkapannya, sedangkan indikator yang telah diungkapkan keseluruhan dari sub-indikator oleh bank umum syariah ialah indikator ke-lima, yaitu bisnis yang biayai tidak bertentangan dengan syariah.

Bank Umum Syariah dengan tingkat pengungkapan tertinggi yaitu Bank BRISyariah, dengan tingkat pengungkapan sebesar 94%, selanjutnya Bank BCA Syariah dengan tingkat pengungkapan 92%, lalu Bank Mega Syariah dengan tingkat pengungkapan 91%, selanjutnya Bank BNI Syariah dengan tingkat pengungkapan 90%, lalu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Panin Dubai Indonesia dengan tingkat pengungkapan 88%, lalu Bank Syariah Mandiri dengan tingkat pengungkapan sebesar 87%, selanjutnya Bank Bank Syariah Bukopin dengan tingkat pengungkapan sebesar 81%, lalu dilanjutkan dengan Bank MayBank Syariah Indoensia dengan tingkat pengungkapan sebesar 76%, terakhir bank syariah dengan tingkat pengungkapan terendah dari kesepuluh BUS di Indonesia di pegang oleh Bank Victoria Syariah dengan tingkat pengungkapan sebesar 65%.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis. Persamaan hasil penelitian yang

yaitu pada presentase hasil akhir pengungkapan *shariah compliance* pada GCG BUS pada Tahun 2015. Pada penelitian Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, bank dengan tingkat pengungkapan tertinggi yaitu Bank BRISyariah. Sedangkan perbedaannya selain dengan indikator yang diteliti, juga hasil presentase akhir, dimana menurut penulis pengungkapan terendah dipegang oleh Bank Victoria Syariah, sedangkan pada penelitian terdahulu, pengungkapan paling rendah dipegang oleh Bank Maybank Syariah Indonesia.

Secara teori yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dan laporan GCG, masing-masing bank umum syariah telah mengungkapkan *shariah compliance*-nya sebagaimana dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009, meskipun tidak semua sub indikator yang terdapat dalam indikator pengungkapan *shariah compliance* di sajikan dalam laporan masing-masing bank umum syariah dan sesuai dengan aturan-aturan syariah yang berlaku di Indonesia yang telah di jelaskan sebelumnya. Namun, penulis tidak dapat menjamin apakah *shariah compliance* yang telah disajikan dalam laporan telah direalisasikan semuanya dalam kegiatan operasional yang sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah. Ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam meneliti yang hanya mengandalkan dari data sekunder dan tidak meneliti langsung ke lapangan.

Terkait dengan masalah dan judul penelitian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sepuluh BUS di Indonesia telah mengungkapkan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG nya dengan total pengungkapan di atas 50%. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran dari pihak bank untuk mengungkapkan informasi yang di butuhkan bagi nasabah dan masyarakat umum terkait dengan *shariah compliance* yang tidak lain merupakan pembeda dari GCG bank konvensional yang harus dipertahankan dan diungkapkan sebagai kewajiban bank syariah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan GCG dari 10 bank umum syariah yang diteliti terkait dengan masalah pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan *good corporate governance* bank umum syariah pada tahun 2017, maka pada penjelasan kali ini penulis akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut;

1. Bank umum syariah di Indonesia telah menerapkan *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada aturan atau prinsip syariah. Terdapat tujuh (7) indikator yang digunakan dalam meneliti mengenai pengungkapan *shariah compliance* pada bank umum syariah. Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti lima (5) indikator dengan tujuh puluh (70) sub-indikator penelitian pengungkapan yang kemudian disesuaikan dengan laporan GCG dan *annual report* tiap-tiap bank. Serta, berdasarkan 5 dari 7 indikator yang diteliti, indikator ke-tiga yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan indikator dengan total pengungkapan yang paling rendah tingkat pengungkapannya, sedangkan indikator yang telah diungkapkan keseluruhan dari sub-indikator oleh bank umum syariah ialah

indikator ke-lima, yaitu bisnis yang biayai tidak bertentangan dengan syariah.

2. Berdasarkan lima (5) indikator yang diteliti untuk diungkapkan dengan indeks perhitungan menggunakan metode *scoring*, BUS dengan tingkat pengungkapan tertinggi dipegang oleh Bank BRISyariah, dengan tingkat pengungkapan sebesar 94%, selanjutnya Bank BCA Syariah dengan tingkat pengungkapan 92%, lalu Bank Mega Syariah dengan tingkat pengungkapan 91%, selanjutnya Bank BNI Syariah dengan tingkat pengungkapan 90%, lalu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Panin Dubai Indonesia dengan tingkat pengungkapan 88%, lalu Bank Syariah Mandiri dengan tingkat pengungkapan sebesar 87%, selanjutnya Bank Bank Syariah Bukopin dengan tingkat pengungkapan sebesar 81%, lalu dilanjutkan dengan Bank MayBank Syariah Indoensia dengan tingkat pengungkapan sebesar 76%, terakhir bank syariah dengan tingkat pengungkapan terendah dari kesepuluh BUS di Indonesia di pegang oleh Bank Victoria Syariah dengan tingkat pengungkapan sebesar 65%.

## **B. Saran**

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu terbaru dengan indikator penelitian yang lebih lengkap agar terlihat pergerakan tingkat pengungkapan *shariah compliance* terbaru setiap tahunnya, serta peneliti selanjutnya jika memungkinkan untuk menelusuri informasi-informasi terkait pengungkapan *shariah*

*compliance* melalui wawancara untuk memastikan penilaian dari peneliti sama dengan apa yang dimaksud dari bank syariah tersebut.

2. Bagi bank umum syariah;
  - a. Pengungkapan *shariah compliance* terutama dalam indikator keberadaan DPS yang merupakan indikator dengan pengungkapan terendah;
  - b. Bagi Bank Victoria Syariah agar lebih memperhatikan laporan perusahaan yang disediakan, terutama pada laporan keuangan kurang lengkap dan sistematika laporan yang sulit dipahami;
  - c. Bank Syariah Bukopin dan Bank MayBank Syariah Indonesia diharapkan kedepannya sudah menyediakan laporan terkait pelaporan dana zakat yang merupakan salah satu laporan yang harus dilaporkan bagi setiap bank umum syariah di Indonesia;
  - d. Pada bank umum syariah lainnya diharapkan agar tetap menjaga dan meningkatkan penyediaan informasi terkait *shariah compliance*, serta diharapkan kepada seluruh bank umum syariah agar menyediakan laporan perusahaan tepat waktu agar dapat digunakan oleh pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Ahmadi, Abu dan Chaolid Narbuko. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ali, Muhammad. 1987. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa Bandung

Antonio, Muhammad Syafei. 2001. *Bank Syariah bagi Banker dan Prakti Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute

Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*. Tangerang: Aztera Publisher

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Drobne,S dan A. Lisec. 2009. *Multi-attribute Deciston Analysis in GIS: Weighted Linear Combination and Ordered Weighted Averaging*. Informatica

Eliza,Any. 2015. *Analisa Peringkat Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Risiko Bank*. Lampung: Permatanet

Forum for Corporate Governance (FCGI). *Corporate Governance Jilid I*, Edisi 3, Jakarta: FCGI

Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Grafindo



- Lewis, Marfin K. dan Latifa M. Algaud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Muhadjir, Neong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif; Edisi 4*. Rake Sarasin
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: YKPN
- Perwataatmadja, Karnaen dan M.Syafei Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* .Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syakhroza, Akhmad . 2005. *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Ulum, Fahrur. 2011. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya: Putra Media
- Nusantara Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Usman, Rahmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

## Jurnal

Ansori. Maret 2001. *Pengungkapan Shariah compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol.3. Nomor. 2

El Junusi, Rahman. Mei 2012. *Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah*. Jurnal Al Tahrir. Vol. 12. No. 1

Hasan, Zulkifli. 2009. *Corporate Governance: Western and Islamic Persepectives*. International Review of Business Reasearch Papers. Vol. 5. No. 1

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Vol. 3. No. 4

Lutfinanda, Akhirul dan Andwiani Sinarasri. September 2013-Februari 2014. *Analisis Pengaruh Pengungkapan Shariah Compliance terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah pada Prinsip Syariah*. Jurnal Maksimum. Vol.4. No.1

Maradita, Aldira. Mei-Agustus 2014. *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Jurnal Yuridika. Vol. 29. No.2

Mardian, Sepky. 2015. *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol.3. No.1

Mulazid, Ade Sofyan. Juni 2016. *Pelaksanaan Shariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)*. Jurnal Madania. Vol.20. No.1

Nurhisam, Luqman. Januari 2016. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.1. No.23  
Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Jurnal Fokus Ekonomi. Vo.2. No.1

Saramawati, Dedhi Ana Mey dan Ahmad Tarmizi Lubis. 2014. *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol.2. No.2

Sihotang, Dony M. November 2016. *Metode Scoring dan Metode Fuzzy*, Jurnal JNTETI. Vo.5. No.4

Wardayati, Siti Maria. 2011. *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Vol. 19 No.1. Jember: Universitas Jember

### **Naskah Ilmiah**

Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “*Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng*” (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012)

### **Kitab**

Q.S Al-Imran ayat 104. *Waqaf Qur'an*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang

Q.S An-Nisa ayat 59. *Waqaf Qur'an*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016. *Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jilid 1

### **Ensiklopedia dan Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia - Analisis - Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

Pass, C, B. Lowes, dan L. Davies. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi, Terj. Tumpal Rumaepa dan Posman Haloho - Edisi 2*. Jakarta: Erlangga

### **Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional**

Claessens, Stijn. 2003. *Corporate Governance and Development*, Global Corporate Governance Forum, Focus I

Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No.101 Tahun 2007 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 102 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah

Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 103 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Murabahah*

Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No.107 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Ijarah*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas

#### **Web**

Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah. 2017

Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank BRISyariah. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri. 2017

Laporan Keuangan Tahunan Bank Victoria Syariah. 2017

Nasirwan Ilyas. 2006. *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah*. Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Dapat diakses di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

L

A

M

P

I

R

A

N

